



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PT REASURANSI INDONESIA UTAMA (PERSERO)
UNIT KERJA : CORPORATE SECRETARY DIVISION

I. DATA PRIBADI

1. Nama : AJI IRAWAN
2. Jabatan : DIVISION HEAD
3. NHK : 887215

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.500.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 108 m2/60 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 194.000.000

1. MOBIL, MERCEDES BENZ E220 Tahun 1993, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
2. MOTOR, YAMAHA XRIDE Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
3. MOBIL, TOYOTA HARRIER Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 140.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 140.000.000

D. SURAT BERTAGIH Rp. 309.000.000

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 50.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 2.193.000.000

III. HUTANG Rp. 92.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 2.101.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PT REASURANSI INDONESIA UTAMA (PERSERO)
UNIT KERJA : BUSINESS MANAGEMENT DIVISION

I. DATA PRIBADI

- Nama** : ADI SURYA
- Jabatan** : DIVISION HEAD
- NHK** : 891982

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.600.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 174 m2/140 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 1.600.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	100.000.000
1. MOBIL, DAIHATSU TERIOS TS EXTRA AT Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	61.700.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	981.921.374
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	2.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	299.221.882
Sub Total	Rp.	3.044.843.256
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.044.843.256

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PT REASURANSI INDONESIA UTAMA (PERSERO)
UNIT KERJA : LEGAL, COMPLIANCE & RISK MANAGEMENT DIVISION

I. DATA PRIBADI

- Nama** : GADIS PURWANTI
- Jabatan** : DIVISION HEAD
- NHK** : 719895

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 3.230.000.000

- Tanah dan Bangunan Seluas 189 m2/250 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG , HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 30 m2/30 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 36.5 m2/36.5 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 1.380.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 185.000.000

- MOBIL, HONDA HRV Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 185.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 220.580.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 2.197.218.820

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 5.832.798.820

III. HUTANG Rp. ---

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 5.832.798.820

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PT REASURANSI INDONESIA UTAMA (PERSERO)
UNIT KERJA : STRATEGIC DEVELOPMENT DIVISION

I. DATA PRIBADI

- Nama : MARDIAN ADHITYA
- Jabatan : DIVISION HEAD
- NHK : 822852

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.750.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 280 m2/330 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 1.750.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	610.000.000
1. MOBIL, HONDA BRV PRESTIGE SUV Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 290.000.000		
2. MOBIL, HONDA CIVIC TURBO SEDAN Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 320.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	439.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.799.000.000
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.799.000.000

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan



Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.